

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2018-2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan Pemerintah belum matang dalam melakukan perencanaan program dan proyek pemerintah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan belum dapat terlaksana dengan baik.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu berdasarkan Analisis Rasio adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00.
 - 2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih berada dalam interval 0%-25%.

2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikategorikan tidak efisien karena berada pada interval 100% keatas.

2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dari Rasio Pertumbuhan memerlukan perhatian yang lebih dikarenakan pada tahun 2018-2020 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu, dinilai kinerjanya masih kurang baik karena pada komponen belanja menunjukkan persentase yang lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan.

2.5 Kinerja keuangan Pemerintah kabupaten belu jika dilihat dari Rasio Keserasian, dapat disimpulkan bahwa Belanja modal lebih tinggi dibandingkan dengan Belanja Operasi yang relatif kecil. Karena dapat dilihat dari persentase belanja operasi yang lebih kecil dibandingkan dengan persentase belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja modal dengan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Belu lebih mengedepankan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten belu ingin menata dan membangun daerahnya menjadi lebih baik lagi agar dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Belu.

6.2 SARAN

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka harus lebih memperhatikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali Potensi-Potensi yang baru dan mengembangkan Potensi-Potensi yang ada sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat.
2. Meningkatkan Kinerja Keuangan yang baik dengan memperhatikan rasio pertumbuhan dalam belanjanya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan referensi ini untuk penelitian selanjutnya dengan menambah variabel dan diharapkan untuk lebih mendalam meneliti mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio sehingga penelitiannya bisa lebih handal dan akurat dari pada peneliti yang telah dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Haryono, Jusup. 2005. *Dasar- Dasar Akuntansi*. Edisi Enam. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Barisan, Zaki. 2009. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Darise, N. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.
- Epivani, Rima Villanova. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Periode 2009-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Istyaningtiyas, Dian. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2014*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Adminitrasi Publik: Konsep Teori dan Isu*. Yokyakarta: Dava Media.
- Mahmudi. 2010. *Manejemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YANKPN.
- Mahesa, DJ. 2005. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manejemen Keuangan Daerah*. Yokyakarta: Andi
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, DR. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung PT. Refika Aditama
- Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor. 105 Tahun 2000. *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58. Tahun 2005. Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006. Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan*.

Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta)*.

Among Makarti, Volume 7 (13).

Rulin. “*Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara*” . 11 Februari 2014.
<https://respository.Ung.ac.id>

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2014. Tentang *Keuangan Negara*.